

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia ialah negara yang dikenal sebagai Negara *Archipelago* (Negara kepulauan). Menurut Badan Informasi Geospasial (BIG) terdapat 17.504 pulau yang ada di Negara. Hal tersebut juga telah dituliskan dalam konvensi Hukum Laut PBB Tahun 2008. Pada konvensi tersebut, dijelaskan bahwa Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia, dengan luas laut seluas 5,8 juta km² yang terdiri dari laut teritorial dengan luas 0,8 juta km², laut nusantara 2,3 juta km² dan zona ekonomi eksklusif 2,7 juta km². Di samping itu Indonesia memiliki pulau sebanyak 17.480 pulau dan garis pantai sepanjang 95.181 km². (Dewan Kelautan Indonesia, 2008). Hamparan pulau yang begitu luas menyebabkan terbentuknya garis pantai mencapai 81.000 km yang mengelilingi seluruh wilayah Indonesia. Dengan panjang garis pantai tersebut, Indonesia menempati urutan kedua setelah Kanada dengan negara yang memiliki garis pantai terpanjang di dunia. Panjang garis pantai yang dimiliki Indonesia mencapai 54.716 km atau setara dengan 1.3 kali keliling bumi.

Ciri khas yang dimiliki negara kepulauan seperti Indonesia adalah karakteristik wilayah pesisirnya. Wilayah pesisir merupakan suatu daerah peralihan antara ekosistem daratan dan lautan. Wilayah ini dapat ditandai dengan berkembangnya berbagai ekosistem alami seperti hutan mangrove, terumbu karang, padang lamun dan estuaria (Fira, 2017). Wilayah pesisir memainkan peran yang cukup penting bagi kesejahteraan masyarakat, khususnya masyarakat pesisir. Bagian dari wilayah

pesisir yang menghubungkan ekosistem terestrial dan laut merupakan wilayah yang sangat penting bagi penyediaan barang dan jasa untuk kebutuhan masyarakat dan merupakan komponen yang esensial dalam “human survival”. Ekosistem pesisir selain berfungsi secara hidrogeologis, juga menyediakan manfaat ekonomi bagi masyarakat meski kita sendiri tidak menyadarinya. Millennium Ecosystem Assessment (MEA) misalnya mengidentifikasi empat fungsi penyediaan utama dari ekosistem pesisir yakni :

1. Fungsi penyediaan barang dan jasa (misalnya sumber makanan, air, dan udara)
2. Fungsi Pengaturan (pengaturan iklim dan erosi)
3. Fungsi Budaya (nilai-nilai spiritual dan rekreasi)
4. Fungsi pendukung (Sebagai produksi primer dan pembentukan tanah)

Salah satu sumber daya yang memiliki fungsi yang sangat banyak di wilayah pesisir ialah hutan mangrove. Mangrove disebut juga dengan tanaman bakau yang merupakan tanaman dengan ciri khas akar napas. Akar napas sendiri didefinisikan sebagai akar yang mencuat ke permukaan air sehingga sangat efektif untuk menanggulangi atau mencegah terjadinya erosi pantai, terlebih yang disebabkan oleh ombak laut. Dengan demikian tanaman mangrove atau bakau ini sengaja banyak ditanam di daerah pantai terlebih yang rentan dengan abrasi (erosi yang disebabkan oleh ombak laut).

Namun, data yang disampaikan oleh Mangrove Ecosystem Restoration Alliance (MERA) kerusakan hutan mangrove di Indonesia terus mengalami kenaikan. Kawasan hutan wilayah pesisir pada berbagai daerah di Indonesia,

terutama di pantai utara Jawa, Sumatera, Sulawesi Selatan, Bali, dan Kalimantan Timur telah mengalami degradasi akibat kerusakan hutan maupun konversi ke pemanfaatan lainnya sebagai pemukiman, tambak, lahan pertanian, lahan perkebunan, atau industri. Dalam kurun waktu tiga dekade terakhir, ada lebih dari 50% wilayah hutan mangrove yang hilang. Hal ini cukup menyedihkan karena Indonesia pernah dikenal sebagai negara dengan lahan mangrove terbesar di dunia—dengan luas 3,5 juta hektar atau sekitar 20% dari total lahan dunia. Direktur Mangrove Ecosystem Restoration Alliance (MERA), M Imran Amin, mengatakan, penyebab kerusakan hutan mangrove di Indonesia sebagian besar berasal dari aktivitas manusia. Terutama akibat konversi lahan untuk budidaya perikanan dan pertambakan yang merugikan lingkungan.

Konversi lahan adalah perubahan fungsi sebagian atau seluruh kawasan lahan dari fungsi semula atau yang seperti direncanakan menjadi fungsi lain yang membawa dampak negatif terhadap lingkungan dan potensi lahan itu sendiri (Mahyudin, 2012). Kegiatan pemanfaatan lahan ekosistem pesisir berupa konversi yang dilakukan di berbagai tempat di Indonesia telah berlangsung secara dinamis, baik adanya penolakan maupun dukungan akan aktivitas tersebut. Masalah konversi lahan tidak hanya melulu masalah perubahan kondisi lingkungan dan ekologis tetapi menyangkut berbagai manfaat yang diperoleh atas kegiatan tersebut. Rusaknya ekosistem seperti mangrove, perubahan fungsi ekosistem, peninggian daratan dan masalah ekologis lainnya, diiringi juga oleh berbagai manfaat ekonomis yang menyertainya. Tersedianya lahan pemukiman baru, aktivitas produksi tambak, area wisata, pendidikan, pelabuhan, industri dan sebagainya. Semua manfaat baru lahan

hasil konversi dan yang telah dilakukan, bukan saja menimbulkan manfaat pada lokasi atau lahan tersebut juga memiliki manfaat, berupa manfaat pengganda (multiplier efek) bagi aktivitas ekonomi lainnya.

Salah satu wilayah pesisir yang mempunyai hutan mangrove yaitu berada di sepanjang pesisir utara kepulauan Madura. Madura merupakan salah satu pulau yang terletak di sebelah timur laut Jawa Timur yang besarnya kurang lebih 5.168 km^2 Madura terdiri dari 4 kabupaten yakni Bangkalan, Sampang, Pamekasan dan Sumenep. Data keberadaan hutan mangrove di Madura sendiri, dapat dilihat dalam buku berjudul 'Persembahan Prodi Ilmu Kelautan Universitas Trunojoyo Madura untuk Maritim Madura,' ditulis tim peneliti Program Studi Ilmu Kelautan Fakultas Pertanian. Dalam buku tersebut dijelaskan mengenai keberadaan hutan mangrove di empat kabupaten yang ada di Madura. Seperti tabel 1.1 berikut ini :

Tabel 1.1

Luas Hutan Mangrove di Madura Tahun 2015

Kabupaten	Luas Hutan Mangrove (ha)	Persentase dari keseluruhan mangrove di Madura
Bangkalan	1.508,1 ha	10 %
Sampang	915,3 ha	6 %
Pamekasan	599,3 ha	4 %
Sumenep	12.095,4 ha	80 %

Sumber :Ilmu Kelautan UTM 2015

Pada tabel 1.1 diatas diketahui bahwa luas keseluruhan hutan mangrove di Madura adalah sebesar 15.118,1 ha. Jumlah tersebut tersebar di empat kabupaten yang ada di Madura. Kabupaten Sumenep mempunyai hutan mangrove paling luas dibandingkan 3 kabupaten lainnya. Luas hutan mangrove di kabupaten Sumenep adalah sebesar 12.095,4 ha atau sekitar 80% luas hutan mangrove di Madura.

Kabupaten Bangkalan berada di urutan kedua dengan luas hutan mangrove sebesar 1.508,1 ha atau 10% dari luas hutan Mangrove di Madura. Sementara itu, Kabupaten Sampang memiliki luas 915,3 ha atau 6,1% luas hutan mangrove Madura. Terakhir adalah Pamekasan dengan luas hutan mangrove 599,3 ha atau 4% luas hutan mangrove di Madura. Luas hutan mangrove tersebut juga kemudian diklasifikasikan berdasarkan kondisinya, yaitu kondisi baik dan juga kondisi rusak. Seperti tabel 1.2 berikut ini terkait kondisi hutan mangrove di empat Kabupaten di Madura.

Tabel 1.2

Kondisi Hutan Mangrove di Madura Tahun 2015

Kabupaten	Luas Hutan Mangrove (ha)	Kondisi baik	Kondisi buruk
Bangkalan	1.508,1 ha	507, 9 ha (33,7 %)	1.000,2 ha (66,3%)
Sampang	915,3 ha	424,1 ha (46,3%)	491,2 ha (53,7%)
Pamekasan	599,3 ha	353,7 ha (59%)	245,7 ha (41%)
Sumenep	12.095,4 ha	7.508,4 ha (62,1%)	4.587,0 ha (37,9%)

Sumber :Ilmu Kelautan UTM 2015

Berdasarkan tabel terkait kondisi hutan mangrove di Madura diatas. Diketahui bahwa dari luas hutan mangrove di empat kabupaten di Madura, dua kabupaten diantaranya mengalami kerusakan yang lebih banyak dibandingkan kondisi baiknya. Dua Kabupaten tersebut ialah Kabupaten Bangkalan dan juga Kabupaten Sampang. Luas hutan mangrove di Kabupaten Bangkalan dari total 1.508,1 ha 66% diantaranya mengalami kerusakan. Kerusakan lahan di hutan mangrove tersebut sebesar 1.000,2 ha. Sementara itu, luas lahan hutan mangrove di kabupaten Sampang dari total 915,3 ha. Sebanyak 491,2 ha atau 53,7%

diantaranya ialah ber kondisi rusak. Persentase kondisi rusak dengan kondisi baik di dua kabupaten tersebut lebih banyak kondisi rusaknya. Hal itu dapat dikatakan bahwa kondisi hutan mangrove di dua Kabupaten tersebut dalam keadaan tidak baik. Sementara dua Kabupaten lainnya, yaitu Kabupaten Pamekasan and Sumenep. Luas lahan hutan mangrove dalam kategori baik. Hampir 50% lebih kondisi lahan di kedua kabupaten tersebut masuk ke dalam kategori baik. Kerusakan lahan hutan mangrove salah satunya disebabkan oleh peralihan lahan hutan menjadi tambang udang dan pemukiman penduduk. Dari empat kabupaten tersebut, Kabupaten Sampang menjadi Kabupaten yang paling banyak terjadi konversi lahan mangrove yang dialihfungsikan menjadi tambak udang. Kerusakan lahan mangrove di Kabupaten Sampang dapat dijelaskan dalam tabel 1.3 berikut ini:

Tabel 1.3

Luas Hutan Bakau Menurut Kecamatan dan Tingkat Kekritisannya di Kabupaten Sampang Tahun 2015

Kecamatan	Tingkat Kekritisannya			Jumlah
	Tidak Rusak	Rusak	Rusak Berat	
Sreseh	246	26	304	576
Pangarengan	32	95	-	127
Sampang	78	16	-	94
Camplong	20	35	15	70
Jrengik	48	-	-	48
Lainnya	0	0	0	0
Jumlah	424	172	319	915

Sumber : Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Sampang, 2015

Berdasarkan tabel 1.3 terkait penyebaran lahan hutan Mangrove di Kabupaten Sampang. Diketahui bahwa penyebaran hutan mangrove hanya terdapat di lima kecamatan saja. Beberapa kecamatan tersebut diantaranya ialah :

Kecamatan Sreseh, Kecamatan Pangarengan, Kecamatan Sampang, Kecamatan Camplong, dan juga Kecamatan Jrengik. Dari kelima kecamatan tersebut, Kecamatan Sreseh mempunyai luas lahan hutan mangrove yang paling luas. Luas lahan hutan mangrove di Kecamatan Sreseh adalah sebesar 576 ha. Kecamatan dengan luas hutan mangrove paling besar selanjutnya adalah Kecamatan Pangarengan dengan luas hutan mangrove sebesar 127 ha. Selanjutnya ialah Kecamatan Sampang dengan 94 ha, Kecamatan Camplong 70 ha, dan yang terakhir adalah kecamatan Jrengik dengan luas lahan mangrove sebesar 48 ha.

Keberadaan hutan bakau sebagai suatu ekosistem di daerah pasang surut, kehadirannya sangat berpengaruh terhadap ekosistem ekosistem lain di sekitarnya. Terjadinya kerusakan atau gangguan pada ekosistem yang satu tentu saja akan mengganggu ekosistem yang lain. Sebaliknya, keberhasilan dalam pengelolaan (rehabilitasi) hutan bakau akan berdampak baik kepada ekosistem sekitarnya. Ekosistem hutan bakau yang mengalami kerusakan dapat disebabkan oleh dua faktor, yaitu faktor alam dan faktor manusia. Kerusakan ekosistem hutan bakau disebabkan oleh faktor manusia berupa aktivitas ekonomi penduduk yang memanfaatkan sumber daya alam yang terdapat didalam ekosistem hutan bakau tersebut. Aktivitas ekonomi penduduk yang menyebabkan kerusakan hutan bakau, yaitu pengalihan fungsi kawasan ekosistem hutan bakau menjadi lahan pertambakan dan reklamasi pantai untuk kawasan rekreasi atau pariwisata.

Pola pemanfaatan yang dilakukan dalam usaha mencukupi kebutuhan hidup sesuai kemampuan yang masyarakat miliki belum tentu benar dengan apa yang seharusnya dilakukan. Hal tersebut dikarenakan masih terdapat factor-factor yang

melakukan kesalahan kesalahan dalam pemanfaatan ekosistem mangrove (bakau) dan mengkonversinya menjadi tambak, pemukiman, lahan pertanian, lahan perkebunan, industri dan lainnya dalam skala besar tanpa memikirkan keberlanjutan ekosistem pesisir itu sendiri.

Berbagai aktivitas manusia tersebut menyebabkan penurunan luas hutan mangrove dan berakibat juga pada penurunan fungsi dan manfaat mangrove bagi penduduk dan lingkungan sekitarnya. Untuk mengembalikan fungsi dan manfaat mangrove yang rusak tersebut, maka diperlukan adanya upaya pengelolaan melalui rehabilitasi dan konservasi mangrove. Kegiatan rehabilitasi dan konservasi mangrove membutuhkan pengawasan dan pemeliharaan secara berkelanjutan. Kemungkinan keberhasilan rehabilitasi sangat kecil tanpa adanya pengawasan. Keberhasilan rehabilitasi dan konservasi mangrove juga ditentukan oleh beberapa faktor, diantaranya adalah peran serta atau partisipasi penduduk kawasan itu sendiri, karena penduduk lokal merupakan penduduk yang yang mempunyai kepentingan langsung, baik sebagai sumber daya maupun sebagai ekosistem dengan fungsi fungsi ekologisnya dengan wilayah rehabilitasi dan konservasi.

Walaupun Kecamatan Sreseh memiliki luas hutan mangrove yang paling besar. Namun karakteristik hutan mangrove tersebut dalam kondisi yang kurang baik. Dari total lahan hutan mangrove sebesar 576 ha, 57% diantaranya ialah dalam kondisi yang kurang baik. Sebesar 26 ha hutan mangrove dalam kategori rusak, dan 304 ha berada dalam kategori rusak parah. Luas lahan yang masih dalam kategori baik hanya sebesar 246 ha atau 43% dari luas keseluruhan hutan mangrove di Kecamatan Sreseh. Salah satu desa yang mempunyai daerah hutan mangrove ialah

Desa Labuhan. Keberadaan mangrove yang dulunya dimanfaatkan sebagai tempat habitat berbagai jenis mahluk hidup ini. Sekarang sebagian wilayah tersebut sudah berganti dengan dibangunnya tambak udang milik masyarakat setempat. Dari data yang diperoleh dari wawancara dengan warga setempat. Hampir dari 50% luas lahan hutan mangrove saat ini telah berganti menjadi area pertambakan udang.

Alih fungsi lahan atau yang biasa disebut dengan konversi lahan. Pada dasarnya seperti dua mata pisau yang saling mempunyai dampak positif dan dampak negatif. Hal seperti itu juga terjadi di salah satu Desa di Kecamatan Sreseh Kabupaten Sampang. Desa Labuhan merupakan salah satu Desa yang berada di pesisir pantai selatan Kecamatan Sreseh Kabupaten Sampang. Wilayah desa ini hanya memiliki luas wilayah 1.276,75 hektar. Mayoritas penduduk Desa Labuhan ialah berprofesi sebagai nelayan. Pemanfaatan wilayah pesisir hutan bakau di Desa Labuhan banyak dimanfaatkan sebagai tambak ikan serta tambak udang. Selain itu wilayah pesisir yang sebelumnya masih menjadi kawasan hutan mangrove, sekarang beralih fungsi menjadi wilayah perumahan penduduk. Pemanfaatan hutan bakau yang dialihfungsikan tersebut sangat berimbas pada eksistensi dari bakau itu sendiri. Hal tersebut dikarenakan banyak jenis-jenis pohon yang rusak ditebang untuk kepentingan area pertambakan.

Berdasarkan konsep pembangunan secara berkelanjutan. Kegiatan alih fungsi lahan mangrove sebenarnya memang sah-sah saja kalau memperhatikan hal-hal seperti kelestarian lingkungan sekitarnya. Pembangunan ekonomi pada dasarnya harus memperhatikan pilar-pilar pembangunan ekonomi berkelanjutan. Adapun pilar-pilar pembangunan ekonomi secara berkelanjutan adalah berupa

keberlanjutan ekonomi, berkelanjutan secara sosial serta keberlanjutan secara lingkungan atau bisa disebut juga terjaganya kelestarian lingkungan. (Jaya, 2004). Pembangunan ekonomi yang hanya memperhatikan titik ekonominya saja tanpa memperhatikan kelestarian lingkungan akan berdampak kepada generasi selanjutnya yaitu berupa ketersediaan sumber daya alam yang semakin menipis. Jika hal tersebut terjadi, maka akan berdampak juga kepada generasi yang selanjutnya.

Seperti halnya dengan alih fungsi lahan mangrove menjadi areal pertambakan. Konsep pembangunan ekonomi berkelanjutan haruslah diterapkan dengan menggunakan pilar-pilar. Hal tersebut dilakukan agar terciptanya ekosistem sirkulasi air yang tidak berdampak negatif bagi manusia di kemudian hari. Terdapat kemungkinan lain bahwa saat air hujan berlimpah di daerah hulu (saat hujan lebat) dan kalau tidak cukup ada vegetasi di daerah hulu, air hujan langsung mengalir ke sungai dan terus ke laut. Kalau daya tampung sungai atau parit di daerah hilir tidak memadai, maka akan terjadi banjir dan dapat menimbulkan kerugian ekonomi yang tidak sedikit jumlahnya. Karena itu sebenarnya ada 2 (dua) hal penting mengenai hubungan hulu dan hilir. Kalau manajemen sumber daya air tidak dilaksanakan dengan baik di daerah hulu, maka pada musim penghujan dapat terjadi banjir di daerah hilir karena air selalu mengalir dari daerah hulu ke daerah hilir; dan sebaliknya pada musim kemarau dapat terjadi kekeringan di daerah hilir karena cadangan air di daerah hulu habis sebab tidak ada pasokan air dari curah hujan di musim kemarau dan air tidak disimpan karena kurangnya hutan atau pepohonan di daerah hulu pada waktu musim hujan.

Pembahasan mengenai dampak alih fungsi lahan mangrove menjadi tambak juga sering dibahas dalam penelitian-penelitian terdahulu. Seperti penelitian yang dilakukan oleh (Nurhayati, 2018) terkait Pengaruh pengalihfungsian lahan hutan mangrove menjadi tambak udang terhadap kehidupan sosial ekonomi pada masyarakat Desa Pasar Rawa Kecamatan Gebang Kabupaten Langkat. Dalam penelitian ini diketahui bahwa Pengaruh terhadap alih fungsi lahan hutan mangrove menjadi tambak udang terhadap kehidupan sosial ekonomi yaitu sangat berpengaruh. Hal tersebut karena dapat menghasilkan nilai tambah bagi sebagian penduduk asli masyarakat desa Pasar Rawa yang bekerja sebagai buruh di tambak tersebut. Namun, disisi lain kelestarian mangrove dapat terancam akibat kerusakan lingkungan dan kerugian terhadap kondisi sosial ekonomi penduduk apabila terus menerus terjadi alih fungsi lahan mangrove menjadi tambak udang.

Selain itu penelitian yang dilakukan oleh (Lovapinka et al., 2014) mengatakan bahwa terjadi dua dampak yang dihasilkan dari pengalihfungsian lahan mangrove menjadi tambak udang. Dampak tersebut adalah dampak positif secara ekonomi dan dampak negatif secara keberlangsungan ekosistem. valuasi ekonomi dampak budidaya udang windu dengan alih fungsi lahan mangrove di wilayah Karawang, yaitu dengan kegiatan pemanfaatan hasil hutan mangrove yang dilakukan oleh masyarakat di Kecamatan Tirtajaya adalah pengambilan kayu untuk bahan bakar rumah tangga, pengambilan kepiting, pengambilan udang, dan pengambilan ikan. Kerugian ekonomi dari dampak ini berupa manfaat hasil hutan mangrove tersebut yang hilang akibat perubahan alih fungsi lahan menjadi tambak. Sementara itu, dari segi ekonomi. Penghasilan beberapa pemilik tambak dan pekerjanya meningkat

setelah adanya tambak tersebut. Namun secara keseluruhan melalui hasil analisis secara finansial menunjukkan bahwa dengan mempertahankan hutan mangrove di wilayah ini lebih menguntungkan, baik untuk pemanfaatan langsung maupun tidak langsung.

Selanjutnya adalah penelitian yang dilakukan oleh (Fira, 2017). Dalam penelitian ini diketahui bahwa asal mula petani tambak yang melakukan perubahan lahan mangrove menjadi lahan tambak disebabkan karena adanya faktor kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai fungsi dan manfaat mangrove, faktor ekonomi dan faktor sosial di mana masyarakat desa Bonto manai belum memahami sepenuhnya bahwa pentingnya keberadaan mangrove di wilayah pesisir. Sementara itu, manfaat yang diterima petani tambak setelah melakukan konversi lahan mangrove menjadi lahan tambak yaitu dengan meningkatnya pendapatan yang diperoleh rata-rata sebesar Rp 90.410.198 rupiah/tahunnya yang sebelumnya hanya rata-rata Rp 1.006.533 rupiah/tahunnya.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas. Maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan kemudian dituangkan dalam bentuk skripsi dengan judul “Analisis dampak pengalihan lahan hutan bakau menjadi lahan pertambangan terhadap keadaan sosial ekonomi masyarakat di Desa Labuhan Kecamatan Sreseh Kabupaten Sampang”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah diketahui sebelumnya, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana dampak pengalihan lahan hutan

bakau menjadi lahan pertambakan terhadap keadaan ekonomi masyarakat di Desa Labuhan Kecamatan Sreseh.

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah dan juga rumusan masalah yang dikemukakan, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui serta mendeskripsikan mengenai dampak pengalihan lahan hutan bakau menjadi lahan pertambakan terhadap keadaan ekonomi masyarakat di Desa Labuhan Kecamatan Sreseh

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah dibagi menjadi dua:

1. Secara teoritis penelitian ini dapat digunakan sebagai pengembangan konsep, teori-teori serta pengetahuan tentang dampak pengalihan lahan hutan bakau menjadi lahan pertambakan sebagai pengembangan ilmu pengetahuan lebih lanjut. Dalam hal ini adalah dampak sosial ekonomi dari sebuah pembangunan
2. Secara praktis penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan rekomendasi dalam hal kebijakan pembangunan di wilayah pesisir khususnya yang berkaitan dengan konversi lahan bakau.